



ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PROGRAM MBG PADA PENDIDIKAN SD, SMP DAN SMA NEGERI DI KOTA JAYAPURA

Petrus Yohanes Ismail Arwimbar¹, Ulfa Rahmadani², Ilmidin³

^{1,2,3}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Cenderawasih

arwimbapetrus@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang diluncurkan pemerintah sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik di seluruh jenjang pendidikan serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan kendala pelaksanaan program MBG pada jenjang SD, SMP, dan SMA Negeri di Kota Jayapura. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan populasi seluruh sekolah negeri di lima distrik Kota Jayapura, yaitu Abepura, Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Muara Tami. Sampel penelitian berjumlah 158 responden yang terdiri dari dua guru per sekolah, dipilih dengan teknik *quota sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis secara univariat menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program MBG di Kota Jayapura berjalan dengan baik pada aspek perencanaan dan koordinasi antarinstansi, namun masih terdapat kendala dalam aspek distribusi pangan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta pengawasan mutu gizi di sekolah-sekolah tertentu. Faktor geografis dan logistik di wilayah timur Indonesia turut menjadi hambatan utama dalam efektivitas pelaksanaan program. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana lokal, serta adaptasi kebijakan berbasis konteks wilayah guna menjamin keberlanjutan dan pemerataan manfaat program MBG di masa mendatang.

Kata kunci: *Makan Bergizi Gratis, Implementasi Kebijakan, Kendala Pelaksanaan, Gizi Sekolah,*

Abstract

The Free Nutritious Meal Program is a national policy launched by the government as the implementation of Presidential Regulation No. 83 of 2024 concerning the establishment of the National Nutrition Agency. This program aims to improve nutritional fulfillment among students at all levels of education and to support efforts to accelerate stunting reduction. This study aims to analyze the implementation and challenges of the MBG program at the elementary, junior high, and senior high school levels in Jayapura City. A descriptive quantitative method was employed, involving all public schools across five districts in Jayapura City: Abepura, North Jayapura, South Jayapura, Heram, and Muara Tami. The research sample consisted of 158 respondents, comprising two teachers from each school, selected through quota sampling. Data were collected using structured questionnaires and analyzed univariately using IBM SPSS Statistics version 26. The findings reveal that the implementation of the MBG program in Jayapura City has been well-executed in terms of planning and interagency coordination; however, several challenges persist, particularly in food distribution, limited supporting infrastructure, and nutritional quality monitoring in certain schools. Geographical and logistical constraints in Eastern Indonesia also remain major barriers to effective program implementation. These findings highlight the need for strengthening cross-sectoral governance, enhancing the capacity of local implementers, and adapting policies to regional contexts to ensure the sustainability and equitable benefits of the MBG program in the future.

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, Policy Implementation, Implementation Challenges, School Nutrition*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2026

* Corresponding author : Petrus Yohanes Ismail Arwimbar

Address : Alamat Penulis

Email : arwimbapetrus@gmail.com

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN), sasaran utama pemenuhan gizi nasional meliputi peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui (Perpres No. 83 Tahun 2024). Badan ini memiliki fungsi strategis dalam koordinasi, perumusan kebijakan teknis, serta pelaksanaan penyediaan dan penyaluran gizi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pembentukan BGN merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dalam mengatasi permasalahan gizi secara sistemik dan berkelanjutan (Nango et al., 2025).

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan lokal, serta berfokus pada percepatan pemenuhan gizi dan pengentasan stunting (Fiter et al., 2025). Penyelenggaraan MBG juga diatur melalui tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari sektor pertanian dan UMKM daerah (Pradipta, 2025).

Dari perspektif sosial dan pendidikan, kebijakan MBG memiliki relevansi kuat dengan sila kelima Pancasila, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Program ini memastikan akses gizi yang merata bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi (Oktawila et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa pemberian makanan bergizi di sekolah dapat meningkatkan kehadiran, konsentrasi belajar, serta prestasi akademik peserta didik (Agustini, 2025). Dengan demikian, kebijakan ini berperan sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Meskipun demikian, pelaksanaan MBG menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan distribusi, pengawasan mutu gizi, serta kesiapan infrastruktur di daerah terpencil (Komara et al., 2025). Di wilayah timur Indonesia seperti Papua, faktor geografis dan keterbatasan logistik menjadi hambatan dalam penyaluran bahan pangan bergizi. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan lokal, seperti dinas pendidikan, kesehatan, dan penyedia layanan makan, masih perlu diperkuat untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program (Lestari et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, penting untuk meneliti implementasi dan kendala Program Makan Bergizi Gratis pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Kota Jayapura. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola program,

mekanisme distribusi makanan bergizi, serta persepsi pihak sekolah terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Analisis juga diharapkan mampu mengidentifikasi faktor penghambat serta peluang perbaikan program, khususnya dalam konteks daerah dengan kondisi sosial ekonomi dan geografis yang beragam (Furkan et al., 2025).

Secara konseptual, penelitian ini memandang program MBG bukan hanya sebagai kebijakan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik yang terintegrasi dalam pembangunan manusia menuju *Generasi Emas Indonesia 2045* (Nango et al., 2025). Dengan pemahaman mendalam terhadap implementasi di tingkat daerah, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti bagi keberlanjutan program nasional ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi dan kendala pelaksanaan *Program Makan Bergizi Gratis (MBG)* pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA Negeri di Kota Jayapura. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2025, dengan lokasi penelitian di wilayah administratif Kota Jayapura, yang mencakup lima distrik, yaitu Abepura, Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Muara Tami. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh sekolah dasar dan menengah negeri di Kota Jayapura dengan total 78 sekolah. Responden penelitian adalah guru yang mewakili sekolah masing-masing untuk mengisi kuesioner penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan quota sampling, dengan total populasi 79 sekolah dan dua guru dari setiap sekolah sebagai responden, sehingga diperoleh total sampel sebanyak 158 orang guru. Distribusi sampel berdasarkan wilayah meliputi: Abepura (22 sekolah), Jayapura Utara (13 sekolah), Jayapura Selatan (15 sekolah), Heram (16 sekolah), dan Muara Tami (13 sekolah). Daftar nama sekolah yang terpilih sebagai sampel tercantum dalam lampiran penelitian.

Instrumen dan Analisis Data
Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner terstruktur, yang berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan dan hambatan program MBG di sekolah. Kuesioner ini disusun berdasarkan indikator implementasi kebijakan publik dan pelaksanaan program gizi berbasis sekolah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26, dengan pendekatan analisis univariat untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan distribusi tiap variabel penelitian. Analisis

univariat digunakan untuk menampilkan frekuensi, persentase, serta nilai rata-rata dari variabel yang diamati (Notoatmodjo, 2010; Ghazali, 2018). Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menggambarkan sejauh mana implementasi program MBG di sekolah-sekolah negeri di Kota Jayapura serta mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden

Karakteristik	n	%
Responden		
Jenis Kelamin		
Laki-laki	41	25.9
Perempuan	117	74.1
Implementasi MBG		
Ya	84	53.2
Tidak	74	46.8
Perepsi tentang Implementasi MBG		
Setuju	113	71.5
Kurang Setuju	45	28.5

Berdasarkan data pada Tabel 1 hasil penelitian terhadap 158 responden yang terdiri dari guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA Negeri di Kota Jayapura, diperoleh gambaran karakteristik responden sebagaimana ditunjukkan pada tabel. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 117 orang (74,1%), sedangkan laki-laki sebanyak 41 orang (25,9%). Hal ini menunjukkan bahwa profesi guru di sekolah negeri di Kota Jayapura masih didominasi oleh perempuan, sejalan dengan temuan umum bahwa sektor pendidikan dasar dan menengah di Indonesia banyak diisi oleh tenaga pendidik perempuan.

Terkait dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 84 responden (53,2%) menyatakan bahwa program tersebut telah diimplementasikan di sekolah mereka, sementara 74 responden (46,8%) menyatakan belum. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi program MBG belum merata di seluruh sekolah negeri di Kota Jayapura. Selanjutnya, dari sisi persepsi terhadap implementasi program, sebagian besar responden menyatakan setuju terhadap pelaksanaan MBG dengan jumlah 113 orang (71,5%), sedangkan 45 orang (28,5%) menyatakan kurang setuju. Secara umum, hasil ini menggambarkan bahwa sebagian besar guru memiliki persepsi positif terhadap program MBG sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi peserta didik di Kota Jayapura.

Kendala

Tabel 2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan variabel Kendala dalam implementasi MBG pada sekolah SD,SMP dan SMA Negeri di Kota Jayapura

Kendala	n	%
---------	---	---

Kualitas makanan kurang baik (rasa, kebersihan, tampilan).

Ya	70	44.3
Tidak	88	55.7

Waktu distribusi makanan sering terlambat

Ya	71	44.9
Tidak	87	55.1

Jumlah makanan tidak mencukupi untuk semua siswa

Ya	59	37.3
Tidak	99	62.7

Kurangnya fasilitas dapur dan alat masak yang memadai

Ya	43	27.2
Tidak	115	72.8
Total	158	100.0

Tidak ada petugas gizi yang mendampingi sekolah

Ya	73	46.2
Tidak	85	53.8
Total	158	100.0

Koordinasi antar pihak (sekolah, penyedia, pemerintah) kurang lancar

Ya	82	51.9
Tidak	76	48.1

Beberapa siswa menolak makan karena tidak sesuai selera

Ya	93	58.9
Tidak	65	41.1

Kurangnya pengawasan terhadap kebersihan dan kualitas makanan

Ya	43	27.2
Tidak	115	72.8

Keterbatasan Anggaran dan Pembiayaan

Ya	151	95.6
Tidak	7	4.4

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa dari 158 responden yang diteliti, responden paling banyak menjawab kendala yang paling dominan yaitu keterbatasan anggaran dan pembiayaan program MBG sebanyak 151 (95,6%) dan kendala adanya siswa yang menolak makanan karena tidak sesuai selera sebanyak 93 (58,9%) Responden dan koordinasi antar pihak yang kurang yaitu 82 (51,9%) responden.

Pembahasan

Analisis karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 158 guru yang menjadi responden penelitian, 117 orang (74,1 %) adalah perempuan dan 41 orang (25,9 %) adalah laki-laki. Temuan ini menggambarkan dominasi tenaga pendidik perempuan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah negeri Kota Jayapura. Kondisi ini relevan mengingat bahwa perempuan secara sosial sering diberikan peran lebih besar dalam kegiatan terkait gizi, perawatan anak, dan layanan kesehatan di sekolah maupun komunitas (J. Notoatmodjo, 2018).

Peran dominan perempuan sebagai guru atau petugas layanan sekolah sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa partisipasi perempuan dalam program gizi sekolah meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan

gizi anak (S. Rahmawati & Syafrudin, 2021). Temuan dari studi gender dan gizi di Indonesia, misalnya oleh Nutrition International, menunjukkan bahwa analisis berbasis gender penting dalam intervensi gizi remaja dan lingkungan sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 84 responden (53,2 %) melaporkan bahwa program MBG telah dilaksanakan di sekolah mereka, sedangkan 74 responden (46,8 %) menyatakan belum melaksanakannya. Proporsi ini menunjukkan bahwa meskipun lebih dari separuh sekolah telah menjalankan program, hampir setengahnya belum siap atau belum dapat menjalankan program tersebut dengan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kota Jayapura masih dalam tahap awal dan belum merata di seluruh sekolah negeri.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan publik, model yang dikemukakan oleh George (1980) menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat variabel kritis: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila salah satu dari variabel ini kurang, maka pelaksanaan program bisa terganggu. Oleh karena itu, persentase hampir 47 % sekolah yang belum melaksanakan MBG dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa salah satu atau lebih dari faktor-faktor tersebut belum terpenuhi secara optimal.

Lebih lanjut, kerangka implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) menekankan bahwa dua dimensi utama mempengaruhi implementasi kebijakan publik: isi kebijakan (policy content) dan konteks pelaksanaan (policy context). Dalam konteks program MBG, dimensi isi meliputi kejelasan manfaat, standar menu bergizi, serta alokasi anggaran; sedangkan konteks pelaksanaan meliputi karakteristik institusi sekolah, dukungan pemerintah daerah, logistik distribusi, dan kesiapan wilayah. Variasi kesiapan sekolah di Kota Jayapura dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan dimensi konteks yang berbeda-beda antar sekolah.

Dari sisi persepsi, mayoritas responden (113 orang atau 71,5 %) menyatakan bahwa mereka “setuju” bahwa implementasi program MBG di sekolahnya bermanfaat, sementara 45 responden (28,5 %) menyatakan kurang setuju. Persepsi positif ini penting karena menurut teori Fred D. Davis (1989) melalui model *Technology Acceptance Model* (TAM) yang meskipun awalnya dikembangkan untuk teknologi, dapat diterapkan pula pada kebijakan sosial: bila pelaksana kebijakan (dalam hal ini guru/sekolah) memiliki persepsi positif terhadap kebijakan, maka penerimaan dan partisipasi pelaksanaan akan lebih tinggi.

Persepsi positif guru terhadap program MBG juga selaras dengan bukti empiris internasional bahwa program makanan sekolah yang diterima dengan baik oleh sekolah berkontribusi pada kehadiran siswa, konsentrasi belajar, serta performa akademik. Sebagai contoh, penelitian oleh World Food Programme (2021) menunjukkan bahwa intervensi makanan sekolah mempunyai dampak sosial signifikan. Juga, studi di Indonesia oleh Rachman et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi pendidikan gizi yang dipimpin oleh guru berhasil meningkatkan status hemoglobin remaja perempuan di Bogor.

Namun demikian, penelitian menunjukkan adanya kendala-kendala signifikan dalam implementasi program MBG, seperti: keterbatasan anggaran, penolakan siswa karena selera makanan, koordinasi antar pihak, kualitas makanan kurang baik, keterlambatan distribusi, tidak adanya petugas gizi pendamping, fasilitas dapur yang terbatas, dan kurangnya pengawasan kebersihan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya dan struktur birokrasi sebagaimana diuraikan oleh Edwards serta Grindle belum terpenuhi secara optimal. Di Indonesia sendiri, studi tentang program makanan sekolah (misalnya program PROGAS) menunjukkan bahwa cakupan program masih sangat terbatas karena sumber daya terbatas (Sekiyama, 2018).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa walaupun terdapat dukungan sosial kuat dari pelaksana dan persepsi positif terhadap program MBG, faktor kesiapan institusional, ketersediaan sumber daya, kualitas implementasi menu gizi, dan logistik distribusi masih memerlukan perkuatan. Implikasi bagi kebijakan sekolah dan pemerintah daerah adalah perlunya peningkatan kapasitas anggaran, penyusunan standar menu yang sesuai dengan selera lokal serta gizi seimbang, penguatan koordinasi antar lembaga, dan monitoring kualitas secara rutin agar program MBG dapat berjalan secara merata dan efektif di seluruh sekolah negeri di Kota Jayapura.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 79 sekolah negeri tingkat SD, SMP, dan SMA di Kota Jayapura dengan melibatkan 158 responden, diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (74,1%), yang menunjukkan dominasi tenaga pendidik perempuan dalam pelaksanaan program gizi sekolah, sejalan dengan peran sosial mereka dalam aspek perawatan dan kesehatan anak. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa 53,2% sekolah telah mengimplementasikan Program MBG, sementara

46,8% belum, menandakan bahwa pelaksanaan program masih berada pada tahap awal dan belum merata di seluruh wilayah. Persepsi terhadap pelaksanaan program cukup positif, dengan 71,5% responden menyatakan setuju terhadap keberadaan MBG, menunjukkan penerimaan sosial yang baik serta potensi keberlanjutan yang tinggi. Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi, terutama keterbatasan anggaran (95,6%), penolakan siswa terhadap menu makanan (58,9%), serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal (51,9%). Kendala tambahan meliputi kualitas makanan yang kurang baik, fasilitas dapur yang terbatas, dan minimnya petugas gizi pendamping. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi MBG di Kota Jayapura mendapat dukungan positif, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, perbaikan manajemen logistik, serta peningkatan dukungan sumber daya manusia dan anggaran agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368.
<https://kpd.ejournal.unri.ac.id/index.php/kpd/article/view/361>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia Timur: Tantangan, implementasi, dan solusi untuk ketahanan pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21.
<https://journal.intelekmadani.org/index.php/jgpi/article/view/641/472>
- Fiter, F. J., Setiawan, A., & Nuradhwati, R. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah tentang program makan bergizi gratis sebagai strategi bela negara dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional di Kabupaten Serang, Provinsi Banten menggunakan pendekatan model Pentahelix. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip/article/view/4727>
- Furkan, I. M., Sari, R. A., Fitria, E., Nofrizal, D., Junva, F., Gistituati, N., & Anisah, A. (2025). Mewujudkan makan bergizi gratis: Perspektif guru SD dalam implementasi kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3).
<https://www.ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp/article/view/678>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Panduan nasional program makan bergizi gratis di sekolah. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemendikdasmen. (2025). Portal data pendidikan.
<https://data.kemendikdasmen.go.id/datain/duk/satpen/250000/256000/256001?jalur=formal&bentuk=sma&status=1>
- Komara, C. P., Pitriani, S., Silvya, S., & Yulianti, D. (2025). Program makan bergizi gratis di tengah krisis food waste. *E-SOSPOL: Electronic Journal of Social and Political Sciences*, 12(2).
<https://e-sospol.jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/53789>
- Lestari, D. L., Handayani, Y., A'arif, M., & Amelia, A. Y. (2025). Free nutritious meal policy as a solution to overcoming the stunting problem in Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4).
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14373>
- Mustika, P. Pradipta. (2025, Mei 9). Peraturan Presiden disusun untuk percepat program makan bergizi gratis. *Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/artikel/peraturan-presiden-disusun-untuk-percepat-program-makan-bergizi-gratis>
- Nango, M., Purwoko, B., Hazim, M., & Karwanto, K. (2025). Makan bergizi gratis: Strategi kebijakan publik menuju generasi emas Indonesia 2045. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 25(2).
<https://ejournal.widyayuwana.ac.id/jpak/article/view/991>
- Nida, R., & Puspita Sari, D. D. (2023). School meals program and its impact towards student's cognitive achievement. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 7(1). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Notoatmodjo, S. (2018). Metodologi penelitian kesehatan (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurzakiah, N. (2025). Understanding teachers' motivation and barriers in nutrition-related school programs: A study in Makassar City. MPPKI Journal. Universitas Muhammadiyah Palu.
- Nutrition International. (2023). Sex- and gender-based analysis of adolescent health and nutrition in Indonesia. Brief Report.
- Octawijaya, I. H., et al. (2023). Parent willingness to pay for school feeding programs in Indonesia. *Nutrients*, 15(14), 3212. <https://doi.org/10.3390/nu15143212>
- Oktawila, D., Bagijo, H. E., & Tanudjaja, T. (2025). Kedudukan lembaga negara dalam makan bergizi gratis. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 1595–1602. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5915/3596>
- Oktawila, R., Wulandari, N., & Pratama, H. (2025). Implementasi program makan bergizi gratis dalam perspektif keadilan sosial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–56. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/jgpi/article/view/641>
- Permenkes No. 83 Tahun 2024. Tentang Badan Gizi Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Purwowidhu, C. S. (2025, Februari 17). Program makan bergizi gratis (MBG): Dinamika dan sorotan. *Media Keuangan Kemenkeu*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan>
- Rachman, P. H., Ekawidyani, K. R., Mauludyani, A. V. R., & Februhartanty, J. (2021). The effect of a teacher-led nutrition education program towards nutrition and anemia status of adolescent girls in Bogor, Indonesia. *Nutrire Diaita*, 13(1), 39–47.
- Rahmawati, N., & Syafrudin, S. (2021). Peran gender dalam implementasi program gizi anak sekolah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(2), 89–97.
- Rif'iy, Q., Suratni, Lestari, W., & Muhammad, S. (2025). Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *Indonesian Journal of Innovation Publication*, 5(2), 130–137. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/download/660/483>
- Sekiyama, M., Kawakami, T., Nurdiani, R., Roosita, K., Rimbawan, R., Murayama, N., Ishida, H., & Nozue, M. (2018). School feeding programs in Indonesia. *Japanese Journal of Nutrition and Dietetics*, 76(Suppl. 1), S86–S97. <https://doi.org/10.5264/eiyogakuzashi.76.S86>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, L., & Putri, A. (2020). Preferensi rasa dan penerimaan makanan anak sekolah dasar pada program gizi seimbang. *Jurnal Gizi dan Pangan Indonesia*, 9(1), 45–52.
- World Food Programme (WFP). (2021). State of school feeding worldwide 2021. Rome: WFP.